

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Mudjarat, 2004). Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Menurut Ahyani (2010) dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan intruksi dari pusat, tapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Terkait dengan hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam partisipasi publik terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi.

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang tercermin dari dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri dari atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Sukirno Sadono 2000)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam pembangunan di daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dan kota dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD sehingga daerah menjadi benar-benar otonom. Struktur PAD yang kuat inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut ini tabel 1.1 adalah data Pendapatan Asli daerah, Inflasi, konsumsi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada dikabupaten Aceh Utara.

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah, Inflasi, Konsumsi dan**  
**Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Aceh**  
**Utara Tahun 2013-2015**

Tahun	PAD (Miliar Rupiah)	Inflasi (%)	Konsumsi (%)	PDRB (%)
2013	99.869.693.144	8,27	2,68	3,4
2014	178.550.865.626	8,53	3,22	4,5
2015	200.106.069.785	2,44	3,12	4,69

Sumber : BPS Aceh Utara, 2015

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal tersebut terjadi mulai tahun 2008 – 2010 (Lampiran 1). Pendapatan Asli Daerahnya pada tahun 2008 adalah sebanyak 82.175.217.140,

sedangkan pada tahun 2009 pendapatan asli daerahnya 79.924.769.604 dan pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah 32.610.923.051. Sedangkan produk domestik regional bruto mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2009 produk domestik regional brutonya 3,37 % dan pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan yaitu 3,70 %. ( BPS Kabupaten Aceh Utara, 2015)

Dari penjelasan diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap produk domestik regional bruto tidak sesuai dengan teori, seperti yang tercantum dalam buku (Sidik,2002) yaitu “Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi- potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto).”

Kemudian di Kabupaten Aceh Utara selain pendapatan asli daerahnya kecil, di tambah lagi dengan terjadinya inflasi, dari tahun ke tahun inflasi juga meningkat, yaitu pada tahun 2013 dan 2014 inflasi yang terjadi di Aceh utara adalah sebesar 8, 27% dan 8,53%, tentu dengan tingkatan inflasi yang besar ini sangat mempengaruhi Pdrb di kabupaten Aceh Utara.

Selain itu, inflasi juga akan memberi dampak terhadap konsumsi masyarakat atau rumah tangga, apabila inflasi naik, maka konsumsi masyarakat akan berkurang, karena harga barang akan melambung tinggi, namun tingkat upah atau gaji yang diterima oleh masyarakat dari perusahaan atau tempat kerja lainnya tidak akan berubah, nilainya tetap sama. Hal ini akan berdampak juga pada produksi perusahaan

yang ada di Aceh Utara, sehingga perekonomian di kabupaten Aceh utara semakin hari semakin menurun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Pendapatan asli daerah, inflasi dan konsumsi terhadap produk domestik regional bruto di kabupaten Aceh Utara tahun 1986-2015”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah “berapa besarkah pengaruh pendapatan asli daerah, inflasi dan konsumsi terhadap produk domestik regional bruto (pdrb) di kabupaten Aceh Utara periode 1986-2015 ”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai “ Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, konsumsi dan inflasi terhadap produk domestik regional bruto (pdrb) di kabupaten Aceh Utara periode 1986-2015”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1) Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh pendapatan asli daerah, konsumsi dan inflasi terhadap pruduk domestik regional bruto sehingga dapat

digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi. Dan dapat melengkapi kajian mengenai produk domestik regional bruto.
- 3) Sebagai referensi kepada peneliti lain guna mengembangkan dan menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

